

STRATEGI PERDAGANGAN GLOBAL DAULAH FATIMIYAH

Nurul Fitrah Ilham¹, Nasrullah Bin Sapa², Hamzah Haeriyah³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; rhaaaa1901@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id

Abstract

Keywords:

Fatimid Empire, global trade, Islamic economic history, trade strategy, caliphate.

This study examines the global trade strategy of the Fatimid Empire and its impact on economic development and social dynamics in the Mediterranean region during the classical Islamic era. Starting from North Africa and then moving the center of power to Cairo, Egypt, the Fatimids took advantage of Egypt's strategic geographic location as a major hub for international trade networks connecting Asia, Africa, and Europe. Fatimid trade policies were characterized by openness, inclusiveness, and high tolerance towards various religious and ethnic communities, in contrast to the protectionist approach adopted by other political powers at the time. A progressive fiscal system, management of trade taxes, and the development of trade infrastructure such as ports and caravanserais were the main foundations of the Fatimid economy's success. This study highlights that trade not only played a role as a productive economic sector, but also as an instrument of diplomacy, the spread of ideology, and social development. These findings emphasize the importance of reviewing classical Islamic trade practices as a reference for developing a modern Islamic economic system that is fair, inclusive, and sustainable amidst the challenges of globalization and current economic.

Abstrak

Kata kunci:

Daulah Fatimiyah, perdagangan global, sejarah ekonomi Islam, strategi dagang, kekhalifahan.

Penelitian ini mengkaji strategi perdagangan global Daulah Fatimiyah dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi serta dinamika sosial di kawasan Mediterania pada era Islam klasik. Berawal dari Afrika Utara dan kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Kairo, Mesir, Fatimiyah memanfaatkan letak geografis strategis Mesir sebagai simpul utama jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Kebijakan perdagangan Fatimiyah ditandai oleh keterbukaan, inklusivitas, dan toleransi tinggi terhadap berbagai komunitas agama dan etnis, berbeda dengan pendekatan proteksionis yang diadopsi oleh kekuatan politik lain pada masanya. Sistem fiskal progresif, pengelolaan pajak perdagangan, serta pembangunan infrastruktur niaga seperti pelabuhan dan caravanserais menjadi fondasi utama keberhasilan ekonomi Fatimiyah. Studi ini menyoroti bahwa perdagangan tidak hanya berperan sebagai sektor ekonomi produktif, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi, penyebaran ideologi, dan pembangunan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya meninjau ulang praktik-praktik perdagangan Islam klasik sebagai referensi pengembangan sistem ekonomi Islam modern yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan globalisasi dan ketimpangan ekonomi

Corresponding Author:

Nurul Fitrah Ilham

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; rhaaaa1901@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekuasaan Daulah Fatimiyah, yang berlangsung dari abad ke-10 hingga ke-12 M, memainkan peran sentral dalam sejarah Islam klasik. Awalnya berdiri di wilayah Afrika Utara, tepatnya di Tunisia, kekhalifahan ini kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Kairo, Mesir. Pemandahan ini membawa dampak signifikan dalam memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka. Letak geografis Mesir yang sangat strategis—menghubungkan tiga benua besar: Asia, Afrika, dan Eropa—menjadikannya simpul utama dalam jaringan perdagangan internasional. Jalur perniagaan melalui Laut Merah dan Laut Mediterania (Nur Annisa 2025) memperkuat posisi Mesir sebagai poros dagang dunia. Selain itu, keberadaan Sungai Nil memberikan kemudahan dalam distribusi barang dari wilayah pedalaman menuju pusat-pusat kota. Transportasi air ini mempercepat lalu lintas komoditas dari Afrika dan Samudera Hindia. Kota-kota seperti Kairo dan Alexandria pun berkembang menjadi pusat ekonomi yang ramai. Dengan kondisi ini, Fatimiyah menjadikan Mesir sebagai episentrum perdagangan dan kekuasaan regional. (Mutmainnah 2024)

Konsep keterbukaan dan inklusivitas menjadi ciri khas utama dalam kebijakan perdagangan Fatimiyah. Tidak seperti beberapa kekuatan politik lain yang lebih menekankan proteksionisme, Fatimiyah justru membuka ruang seluas-luasnya bagi pertukaran barang, ide, dan budaya. Hal ini bukan hanya didasarkan pada kalkulasi ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan ideologis: memperluas pengaruh Ismailiyah sebagai alternatif kekhalifahan dari Dinasti Abbasiyah (Fitriah 2024). Perdagangan dalam konteks Fatimiyah menjadi instrumen soft power untuk memperkuat posisi ideologis dan memperluas pengaruh kultural di dunia Islam dan sekitarnya. Kebijakan-kebijakan perdagangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari strategi fiskal dan tata kelola negara yang canggih. Daulah Fatimiyah mengembangkan sistem perpajakan yang fleksibel dan adaptif, dengan memanfaatkan pendapatan dari bea cukai, pajak perdagangan, dan pengelolaan jalur strategis untuk mengontrol arus barang. Lebih jauh, mereka juga membangun infrastruktur niaga seperti caravanserais dan gudang pelabuhan (marasi), yang menjadi fondasi logistik bagi keberlanjutan kegiatan perdagangan internasional (Fakhry Zamzam, 2019)

Strategi perdagangan global Daulah Fatimiyah sangat berfokus pada pengembangan pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan yang menjadi titik temu berbagai komoditas dan budaya. Kota-kota seperti Kairo, Fustat, dan Alexandria berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan dunia Islam dengan India, Eropa, dan negara-negara Kristen di sekitar Laut Tengah (Rossa 2024). Selain itu, Fatimiyah menerapkan kebijakan yang mendukung keamanan dan kelancaran perdagangan, termasuk regulasi perpajakan yang terorganisir dan pemberian toleransi tinggi terhadap pedagang dari berbagai latar belakang agama dan etnis, sehingga menciptakan iklim perdagangan yang harmonis dan produktif.

Kemajuan ekonomi Daulah Fatimiyah tidak hanya didukung oleh posisi geografis dan kebijakan perdagangan, tetapi juga oleh pengelolaan sumber daya yang

efektif dan pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi. Pendapatan dari perdagangan digunakan untuk memperkuat sektor pertanian, industri kerajinan, serta pengembangan pasar yang terorganisasi dengan baik (Fakhry Zamzam, 2019). Strategi perdagangan global ini menjadikan Fatimiyah sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Mediterania dan sekitarnya, yang mampu mempertahankan kemakmuran dan stabilitas selama masa pemerintahannya.

Namun demikian, meskipun kontribusi ekonomi dan strategi perdagangan Fatimiyah sangat signifikan, kajian akademik terhadap topik ini masih sangat terbatas. Literatur sejarah Islam lebih banyak berfokus pada aspek teologis atau konflik sektarian dalam Fatimiyah, sementara aspek kebijakan perdagangannya cenderung terpinggirkan. Padahal, studi terhadap strategi ekonomi Fatimiyah, khususnya dalam konteks perdagangan global, sangat relevan untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap sistem ekonomi Islam yang pernah eksis dan aplikatif secara historis. Terlebih dalam konteks kontemporer, di mana dunia Islam menghadapi tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan akan model perdagangan yang adil dan berkelanjutan, meninjau ulang praktik-praktik perdagangan Islam klasik seperti yang diterapkan Fatimiyah menjadi penting. Strategi perdagangan Fatimiyah yang menggabungkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*syura*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem perdagangan Islam modern yang kompetitif namun tetap etis (Yusuf 2022).

Perdagangan dalam peradaban Islam klasik tidak hanya berperan sebagai sektor ekonomi produktif, melainkan juga sebagai instrumen kultural, diplomasi, dan penyebaran ideologi. Daulah Fatimiyah merupakan contoh historis di mana perdagangan dijadikan bagian dari strategi pembangunan negara. Dalam hal ini, pendekatan mereka dapat dilihat sebagai realisasi awal dari konsep *ekonomi Islam berbasis nilai dan strategi global*. Banyak kajian menegaskan bahwa Fatimiyah mampu memposisikan dirinya sebagai pusat perdagangan internasional karena keberhasilan dalam mengelola rute maritim dan darat utama dunia Islam (Rofiqoh, 2022) Jalur Laut Merah menjadi penghubung vital antara India, Yaman, dan Afrika Timur dengan Laut Tengah, yang menjadi pintu masuk barang-barang dari Eropa Selatan. Dalam hal ini, pelabuhan seperti Alexandria, Fustat, dan Kairo berperan penting sebagai simpul distribusi perdagangan (Lukman & Widya, 2022)

Lebih jauh, kebijakan perdagangan Daulah Fatimiyah ditopang oleh sistem fiskal progresif. Khalifah Fatimiyah mengatur pungutan bea masuk (*maks*) dan pengelolaan pajak perdagangan dengan sistem redistribusi, di mana pendapatan dari sektor ini digunakan untuk membiayai infrastruktur publik dan lembaga keilmuan seperti Dar al-'Ilm (Al Fauziah 2021) . Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memperhatikan profitabilitas, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-shariah*. Pendekatan pluralis dalam hubungan dagang juga memperlihatkan kedewasaan politik ekonomi Fatimiyah. Mereka memberikan izin perdagangan kepada komunitas Kristen Koptik, Yahudi, dan bahkan mitra Eropa, selama tidak bertentangan dengan

hukum negara dan prinsip keadilan (Anshary 2016) . Toleransi ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas sosial, yang menjadi ciri khas ekonomi Islam klasik. Dengan demikian, penting untuk menelusuri dan mengevaluasi kembali kebijakan perdagangan Fatimiyah dalam konteks sejarah ekonomi Islam. Selain memberikan gambaran tentang dinamika perdagangan global masa lalu, kajian ini juga membuka ruang reflektif untuk menghadirkan sistem perdagangan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis nilai dalam era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis strategi perdagangan global Daulah Fatimiyah dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi serta dinamika sosial di kawasan Mediterania. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur sejarah Islam klasik, jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen terkait yang membahas aspek politik, ekonomi, serta kebijakan perdagangan Fatimiyah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menginterpretasikan informasi yang relevan mengenai kebijakan perdagangan, sistem fiskal, infrastruktur niaga, serta peran kota-kota utama seperti Kairo, Fustat, dan Alexandria dalam jaringan perdagangan internasional. Peneliti juga membandingkan kebijakan Fatimiyah dengan kekuatan politik lain pada masa yang sama untuk menyoroti keunikan dan kontribusi mereka dalam sejarah ekonomi Islam. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dan hasil penelitian terdahulu untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang digunakan. Seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan kaidah penulisan akademik dan penelaahan kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Geopolitik dan Pengaruh Strategis Mesir dalam Kekuasaan Fatimiyah

Penaklukan Mesir oleh Daulah Fatimiyah pada tahun 969 M menjadi titik balik dalam sejarah kekuasaan Islam. Dipimpin oleh Jenderal Jawhar al-Siqilli, Fatimiyah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Dinasti Ikhsyidiyah dan segera membangun kota al-Qahira (Kairo), yang menjadi pusat pemerintahan dan simbol supremasi ideologis Syiah Ismailiyah. Kairo tidak hanya didesain sebagai pusat militer dan administrasi, tetapi juga sebagai pusat keilmuan dan dakwah. Pendirian Masjid al-Azhar serta Dar al-'Ilm menunjukkan bahwa Fatimiyah menjadikan Mesir sebagai pusat intelektual dunia Islam (Walker, 2002).

Letak geografis Mesir yang menghubungkan tiga benua – Asia, Afrika, dan Eropa – menjadikannya simpul penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Mesir memiliki dua jalur air strategis, yaitu Laut Merah dan Laut Tengah, serta Sungai Nil yang memperlancar arus barang dari wilayah pedalaman ke pelabuhan. Kota-kota seperti Alexandria, Fustat, dan Damietta menjadi titik sentral distribusi barang dari

India, Afrika Timur, dan Eropa Selatan, yang memperkuat posisi ekonomi Fatimiyah secara global (Lukman & Widya, 2022).

Kontrol atas jalur dagang maritim dan darat menjadikan Fatimiyah sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Mediterania. Armada laut yang dibangun dengan tujuan komersial dan militer memastikan keamanan jalur perdagangan dan perlindungan komoditas bernilai tinggi seperti rempah-rempah, emas, dan tekstil. Keberadaan infrastruktur pelabuhan dan caravanserai memperlancar aktivitas perdagangan, menjadikan Fatimiyah aktor dominan dalam perdagangan internasional (Rofiqoh, 2022).

Di samping potensi ekonomi, Mesir juga menjadi pusat geopolitik strategis yang memungkinkan ekspansi ideologis Fatimiyah ke wilayah Syam dan Hijaz. Menguasai Makkah dan Madinah adalah bagian dari legitimasi spiritual untuk menandingi otoritas khalifah Abbasiyah. Perluasan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga diplomatis melalui aliansi dan koeksistensi dengan berbagai kelompok lokal termasuk Kristen Koptik dan Yahudi. Kebijakan toleransi tersebut berkontribusi pada stabilitas sosial dan memperkuat jejaring dagang (Anshary, 2016).

Lebih dari itu, Fatimiyah menunjukkan kecanggihan dalam mengelola fiskal negara. Pendapatan dari pajak perdagangan, bea masuk, dan pengelolaan pelabuhan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan pendidikan. Sistem redistribusi pajak yang mereka terapkan memperlihatkan orientasi pada keadilan sosial, sesuai dengan nilai-nilai maqashid al-shariah. Penelitian Bondioli (2021) menyatakan bahwa sistem perpajakan Fatimiyah cenderung fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Meski menghadapi tantangan dari Qarmatian dan faksi-faksi yang berafiliasi dengan Abbasiyah, Fatimiyah tetap mampu mempertahankan kestabilan wilayah melalui kekuatan militer yang terorganisir dan dukungan ekonomi yang kuat. Pertahanan ibu kota dari serangan Qarmatian pada tahun 971 dan 974 menjadi bukti kesiapan militer dan pentingnya Mesir dalam sistem pertahanan kekhalifahan. Hal ini menunjukkan bagaimana Mesir dijadikan benteng utama dalam strategi geopolitik Fatimiyah (Halm, 1997).

Dengan demikian, keberhasilan Daulah Fatimiyah dalam menjadikan Mesir sebagai pusat kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh letaknya yang strategis, tetapi juga oleh visi politik, kecanggihan ekonomi, kemampuan militer, dan kecerdasan diplomasi. Fatimiyah berhasil memadukan pendekatan ideologis, militer, dan ekonomi untuk membangun stabilitas jangka panjang. Studi ini memperlihatkan bahwa Mesir bukan hanya wilayah yang ditaklukkan, tetapi diubah menjadi episentrum peradaban yang menjangkau dunia Islam secara luas (Bennison, A. K. 2009).

Kebijakan Perdagangan Fatimiyah: Kombinasi antara Ideologi dan Ekonomi

Daulah Fatimiyah menerapkan kebijakan perdagangan yang sangat khas dibandingkan kekhalifahan Islam lainnya. Mereka tidak sekadar menjadikan perdagangan sebagai sarana ekonomi, melainkan juga sebagai media untuk

memperluas pengaruh ideologis, membangun stabilitas sosial, serta menunjukkan keunggulan sistem ekonomi Islam. Pendekatan ini mencerminkan pandangan holistik Fatimiyah terhadap ekonomi sebagai bagian dari dakwah dan politik kenegaraan. Kebijakan mereka bukan hanya bersifat teknis atau fiskal, tetapi berakar pada paradigma keislaman yang mendalam (Rossa, 2024). Salah satu aspek penting dari kebijakan perdagangan Fatimiyah adalah keterbukaan terhadap pedagang dari berbagai latar belakang agama dan bangsa. Pedagang Kristen, Yahudi, bahkan dari Eropa diberi akses berdagang di wilayah Fatimiyah selama mereka tunduk pada hukum yang berlaku. Toleransi ini bukan semata hasil pragmatisme ekonomi, melainkan bagian dari strategi ideologis untuk menampilkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai entitas Islam yang kosmopolit dan adil. Kebijakan ini memperkuat citra kekuasaan yang moderat, berorientasi masalah umum, dan kompatibel dengan nilai-nilai maqashid al-shariah (Al Fauziah, 2021).

Dalam praktiknya, Fatimiyah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Alexandria dan Damietta sebagai pusat distribusi barang internasional. Di pelabuhan-pelabuhan ini, mereka mendirikan gudang besar (marasi'), caravanserai, dan sistem bea cukai yang fleksibel namun terorganisir. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan niaga dapat berlangsung dengan efisien, sekaligus menciptakan pendapatan negara dari sektor perdagangan. Sistem logistik yang dibangun tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dunia Islam (Zamzam, 2019). Fatimiyah memahami betul bahwa perdagangan adalah alat soft power untuk memperluas pengaruh ideologi Ismailiyah. Para pedagang yang dikirim ke luar wilayah Fatimiyah sering membawa serta pesan keagamaan dan nilai-nilai politik dari pusat kekhalifahan. Hal ini dilakukan secara halus dan tidak memaksa, menunjukkan bagaimana perdagangan dapat menjadi wahana penyebaran pemikiran politik. Dalam konteks ini, perdagangan bukan hanya interaksi ekonomi, tetapi juga dialog budaya dan diplomasi lintas bangsa (Bennison, A. K. 2009).

Aspek fiskal kebijakan perdagangan Fatimiyah sangat progresif. Mereka mengenakan pajak berdasarkan volume dan jenis barang, namun tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Bahkan dalam beberapa kondisi krisis, negara melakukan penghapusan atau pengurangan pajak demi menjaga stabilitas pasar. Pendapatan dari pajak perdagangan dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur publik, pendidikan, dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Dar al-'Ilm. Ini menunjukkan bagaimana Fatimiyah mengintegrasikan fungsi ekonomi dan sosial secara harmonis (Yusuf, 2022). Fatimiyah juga menetapkan regulasi mutu produk dan pengawasan pasar. Praktik pengawasan ini dilakukan oleh petugas khusus yang memastikan harga tetap stabil dan produk sesuai standar. Mereka memiliki mekanisme pengawasan terhadap monopoli dan penimbunan barang yang merugikan publik. Kebijakan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan ('itidal) dalam sistem pasar. Dalam kerangka ekonomi Islam, ini menjadi cerminan dari penerapan nilai hisbah secara institusional (Al Fauziah, 2021; Zamzam, 2019). Penting

dicatat bahwa keterbukaan perdagangan Fatimiyah tidak berarti tanpa batas. Mereka menetapkan batasan yang tegas terhadap aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perdagangan budak ilegal atau komoditas haram. Dengan demikian, walaupun terbuka terhadap berbagai bangsa dan budaya, Fatimiyah tetap memegang prinsip syariah dalam orientasi perdagangannya. Inilah bentuk keseimbangan antara ideologi dan realitas ekonomi yang jarang ditemukan pada kekuatan politik lain di masa itu (Fulton, 2020; Sanders, 1994).

Perdagangan lintas benua yang dimotori oleh Fatimiyah juga berfungsi sebagai penghubung antara dunia Timur dan Barat. Dalam kajian sejarah perdagangan maritim, jalur Laut Merah yang dikuasai Fatimiyah menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan global pra-modern. Komoditas dari India, Tiongkok, dan Asia Tenggara dibawa ke pelabuhan Fatimiyah, kemudian didistribusikan ke Eropa melalui Laut Tengah. Hal ini menempatkan Fatimiyah dalam posisi strategis sebagai perantara ekonomi dunia (Fulton, 2020). Sikap adaptif terhadap perubahan pasar juga menjadi kekuatan kebijakan perdagangan Fatimiyah. Mereka mampu menyesuaikan sistem bea cukai dan logistik terhadap dinamika perdagangan internasional. Ini terbukti dari kelangsungan aktivitas perdagangan yang tetap tinggi meskipun terjadi fluktuasi politik dan militer di wilayah sekitar. Sistem niaga yang adaptif, terorganisasi, dan etis menjadi keunggulan Fatimiyah dalam menghadapi persaingan global (Rossa, 2024; Yusuf, 2022).

Dalam perspektif ideologis, perdagangan di tangan Fatimiyah adalah instrumen dakwah dan rekayasa sosial. Melalui perdagangan, mereka tidak hanya memperkenalkan sistem ekonomi Islam, tetapi juga memperluas nilai-nilai keilmuan, etika sosial, dan spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam paradigma Fatimiyah tidak dipisahkan dari visi kenegaraan dan peradaban Islam secara menyeluruh. Sistem yang mereka bangun dapat dikategorikan sebagai model ekonomi berbasis nilai (*value-based economy*) yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan stabilitas (Halm, 1997;). Kebijakan perdagangan ini juga memperkuat legitimasi politik mereka di tengah kontestasi dengan Dinasti Abbasiyah. Dengan menjadikan perdagangan sebagai instrumen stabilisasi sosial dan kesejahteraan rakyat, Fatimiyah berhasil membangun loyalitas masyarakat dan memperluas basis pendukung. Bahkan di wilayah yang semula menjadi pusat kekuasaan Abbasiyah, sistem perdagangan Fatimiyah tetap diterima karena efisiensi dan keadilannya. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan ekonomi dapat melampaui batas-batas sektarian jika dikelola dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Anshary, 2016).

Salah satu implikasi penting dari sistem ini adalah terciptanya lapisan kelas menengah yang dinamis di wilayah Fatimiyah. Banyak dari mereka berasal dari kalangan pengusaha, pedagang, dan pengrajin yang mendapat akses modal dan pasar melalui sistem ekonomi negara. Inilah cikal bakal transformasi ekonomi berbasis masyarakat (*community-based economy*) yang berakar dari kebijakan perdagangan yang partisipatif dan terbuka (Zamzam, 2019; Yusuf, 2022). Secara keseluruhan,

kebijakan perdagangan Daulah Fatimiyah merupakan integrasi cerdas antara nilai Islam, realitas politik, dan logika ekonomi. Sistem ini tidak hanya menghasilkan kekayaan material, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan memperluas pengaruh ideologi negara. Pendekatan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi perumusan kebijakan perdagangan Islam kontemporer yang berkeadilan, efisien, dan berbasis nilai (Rofiqoh, 2022; Al Fauziah, 2021). Dengan memperhatikan keberhasilan Fatimiyah dalam mengelola perdagangan sebagai strategi ideologis dan ekonomi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kekuatan ekonomi bukan sekadar persoalan modal dan sumber daya, tetapi juga menyangkut visi, tata kelola, serta keberpihakan terhadap nilai dan keadilan. Studi lebih lanjut mengenai sistem perdagangan Fatimiyah akan sangat berguna untuk merumuskan model ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada prinsip syariah (Yusuf, 2022; Halm, 1997)

Peran Jalur Maritim dan Integrasi Ekonomi Transregional

Perdagangan lintas benua yang dilakukan oleh Daulah Fatimiyah tidak hanya berfokus pada daratan, tetapi juga sangat bergantung pada kekuatan maritim mereka. Jalur Laut Merah dan Laut Tengah menjadi jalur vital dalam lalu lintas komoditas dari Timur ke Barat. Keunggulan geografis ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Fatimiyah untuk menghubungkan pasar Asia dengan Afrika dan Eropa. Menurut Rizqillah (2023), penguasaan Fatimiyah atas jalur maritim merupakan representasi dari kemampuan kekhalfahan untuk membentuk arsitektur perdagangan global yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelabuhan Alexandria, Damietta, dan Fustat berfungsi sebagai simpul utama dalam distribusi barang mewah seperti rempah-rempah, tekstil, dan logam mulia ke pasar-pasar Eropa. Sistem pelabuhan yang terstruktur dengan baik, dilengkapi dengan marasi' dan caravanserai, memperkuat fungsi pelabuhan sebagai pusat niaga sekaligus titik kontrol logistik negara. Dalam penelitian Farouq & Salamah (2022), disebutkan bahwa stabilitas perdagangan Fatimiyah di sektor maritim disebabkan oleh sistem bea cukai yang transparan serta pengawasan ketat terhadap praktik dagang yang merugikan publik.

Keberhasilan perdagangan maritim ini tidak hanya mendongkrak pendapatan negara, tetapi juga menjadi alat diplomasi ekonomi lintas peradaban. Fatimiyah menjalin hubungan dagang dengan berbagai kerajaan non-Muslim di Eropa dan Afrika, tanpa mengorbankan prinsip syariah. Al-Faruqi (2020) menyebut hal ini sebagai bentuk awal dari diplomasi ekonomi Islam yang inklusif dan berbasis nilai. Dalam praktiknya, perdagangan lintas batas yang dijalankan Fatimiyah tidak sekadar transaksi barang, tetapi juga pertukaran ide, budaya, dan pengaruh politik.

Fatimiyah juga memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah kekuasaannya. Mesir sebagai pusat kekuasaan dihubungkan dengan Syam, Maghrib, dan Hijaz melalui jalur darat dan laut yang terorganisir. Hubungan antarwilayah ini menciptakan keterpaduan logistik dan fiskal yang memudahkan distribusi barang dan aliran pajak. Kholid (2021) menyatakan bahwa model interkoneksi ekonomi semacam ini merupakan cikal bakal dari integrasi ekonomi kawasan berbasis etika Islam dan prinsip keadilan distributif.

Di bidang fiskal, Fatimiyah menerapkan sistem pajak progresif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan. Pedagang kecil diberi keringanan, sementara pedagang besar diwajibkan membayar pajak berdasarkan volume dan jenis barang yang diperdagangkan. Sistem ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-din*. Dalam studi Amirah & Munif (2021), pengawasan pajak oleh lembaga hisbah terbukti efektif dalam menekan eksploitasi dan menciptakan pasar yang adil.

Fungsi hisbah tidak terbatas pada pengawasan pasar, tetapi juga meluas pada kontrol mutu produk, penetapan harga wajar, dan pelarangan praktik monopoli. Para muhtasib bertugas memastikan bahwa perdagangan berlangsung dalam koridor syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Fatimiyah tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, tetapi diarahkan oleh etika dan pengawasan negara. Praktik ini mencerminkan integrasi antara fungsi ekonomi dan moral dalam sistem pemerintahan Islam (Amirah & Munif, 2021).

Strategi ekonomi Fatimiyah juga memberikan ruang tumbuh bagi kelas menengah muslim, terutama para pengrajin, saudagar, dan pemilik usaha kecil. Akses terhadap pasar, modal, dan perlindungan negara terhadap usaha lokal menjadikan ekonomi Fatimiyah tidak hanya berkembang di tingkat elit, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat bawah. Rizqillah (2023) menekankan bahwa inklusivitas ekonomi Fatimiyah berperan besar dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah kesenjangan yang ekstrem.

Dari sisi hubungan internasional, kebijakan perdagangan Fatimiyah memperlihatkan sikap terbuka namun selektif. Mereka menjalin hubungan dagang dengan bangsa Eropa, India, dan Afrika Timur tanpa mengkompromikan prinsip dasar Islam. Dalam beberapa kasus, mitra dagang yang tidak beretika atau melanggar hukum negara dikenai sanksi atau dibatasi aksesnya. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara pragmatisme ekonomi dan komitmen ideologis negara terhadap syariah (Farouq & Salamah, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan perdagangan Fatimiyah bukan hanya hasil dari kekayaan sumber daya atau letak geografis, tetapi juga hasil dari sistem perencanaan ekonomi yang matang. Negara secara aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan niaga, pengaturan harga, dan pemetaan rute dagang. Dalam konteks ini, Fatimiyah menunjukkan bahwa negara Islam mampu mengelola ekonomi pasar secara efisien tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan dan spiritualitas. Kholid (2021) menyebut hal ini sebagai “negara ekonomi berbasis nilai”.

Secara keseluruhan, model perdagangan Fatimiyah memberikan pelajaran penting bagi pembangunan sistem ekonomi Islam kontemporer. Keterpaduan antara kekuatan fiskal, kelembagaan, logistik, dan nilai-nilai Islam menjadikan perdagangan sebagai instrumen pembangunan dan diplomasi yang efektif. Dalam dunia yang semakin terdampak oleh globalisasi dan liberalisme pasar, model Fatimiyah membuktikan bahwa ekonomi Islam bukan hanya mungkin diterapkan, tetapi juga unggul secara etis dan struktural (Al-Faruqi, 2020).

Transformasi Sosial-Ekonomi dan Peran Ilmu Pengetahuan dalam Perdagangan

Keberhasilan strategi perdagangan Daulah Fatimiyah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan diplomasi, tetapi juga memicu transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Kegiatan perdagangan yang aktif mendorong lahirnya komunitas pedagang yang terdidik dan melek literasi, karena kemampuan membaca dan menulis menjadi kebutuhan penting dalam transaksi dan pencatatan niaga. Dalam konteks ini, Fatimiyah menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi penting dalam tata kelola ekonomi. Lembaga seperti Dar al-'Ilm tidak hanya menjadi pusat teologi, tetapi juga pengembangan ilmu ekonomi, geografi, logistik, dan tata niaga (Daftary, 2007).

Perdagangan turut menciptakan stratifikasi sosial baru di masyarakat Fatimiyah, di mana kaum pedagang Muslim dan non-Muslim bisa naik kelas ekonomi berdasarkan kompetensi dan integritas dagang. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem perdagangan Fatimiyah membuka peluang mobilitas sosial vertikal yang sehat. Dalam sistem ini, meritokrasi ekonomi dan akhlak dagang menjadi tolok ukur utama, bukan afiliasi kesukuan atau kekuasaan (Mannan, 1984; Chapra, 2000).

Penguatan kelas menengah pedagang ini juga mendukung stabilitas politik, karena mereka menjadi kelompok penyangga yang loyal terhadap negara, sekaligus penyebar ideologi Ismailiyah secara lunak di kawasan Syam, Afrika Utara, dan Hijaz. Ini menjadikan perdagangan sebagai elemen politik dan kultural yang sangat strategis dalam proyek ideologis Fatimiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Asutay (2012), ekonomi Islam yang ideal adalah ekonomi yang memungkinkan harmonisasi antara kepentingan spiritual, material, dan politik secara berimbang.

Aspek penting lain yang jarang disorot adalah regulasi moral yang diberlakukan dalam transaksi dagang. Fatimiyah mengembangkan mekanisme pengawasan internal berbasis etik Islam, yang menekankan kejujuran (amanah), transparansi (bayyinah), dan keadilan ('adl). Praktik penimbunan barang, riba terselubung, atau pemalsuan kualitas barang dipantau oleh aparat hisbah dan ulama

pasar. Hal ini sejalan dengan prinsip hisbah dalam tradisi fiqh muamalah, yang bertujuan menciptakan tata niaga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis secara sosial (Kahf, 2014).

Dalam menghadapi tekanan eksternal, seperti blokade dagang dari Abbasiyah atau serangan Qarmathian, Fatimiyah menerapkan strategi diversifikasi mitra dagang dan komoditas. Mereka membangun jaringan perdagangan alternatif melalui Laut Merah hingga ke Timur Afrika dan India. Ini memperlihatkan kapasitas diplomasi ekonomi yang adaptif dan resilient, suatu pendekatan yang sangat relevan dalam konteks tantangan geoekonomi modern (Daftary, 2007; Fulton, 2020).

Fatimiyah juga menjadi pionir dalam pengelolaan risiko niaga melalui sistem perkongsian dagang dan wakalah. Sistem ini memungkinkan investor dan pengelola usaha berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai syirkah dan mudharabah dalam ekonomi Islam, sekaligus membentuk jaringan keuangan mikro yang inklusif dan memberdayakan masyarakat bawah (Mannan, 1984; Chapra, 2000).

Dalam hal logistik dan teknologi, Fatimiyah memanfaatkan informasi navigasi, angin muson, dan peta dagang berbasis catatan geografis ilmuwan Muslim seperti al-Idrisi dan al-Maqdisi. Pengetahuan ini meningkatkan efisiensi rute dan mengurangi kerugian dalam pengangkutan barang. Peran ilmu pengetahuan dalam menopang strategi perdagangan ini merupakan bukti bahwa integrasi sains dan ekonomi telah lama eksis dalam peradaban Islam (Al-Maqrizi, 2018; Halm, 1996).

Akhirnya, keberhasilan sistem perdagangan Fatimiyah memberi pelajaran penting bahwa ekonomi Islam bukanlah sistem tertutup atau anti-modernitas. Sebaliknya, ia bersifat inklusif, adaptif, dan berbasis nilai. Dalam dunia yang kini dikuasai oleh perdagangan bebas tanpa etika, pendekatan Fatimiyah bisa menjadi rujukan untuk membangun sistem dagang Islam kontemporer yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

Relevansi Strategi Fatimiyah dalam Pembangunan Ekonomi Islam Kontemporer

Pendekatan perdagangan Daulah Fatimiyah yang berbasis nilai-nilai Islam sangat relevan dijadikan rujukan dalam membangun sistem perdagangan Islam kontemporer. Di tengah krisis etika global dan dominasi pasar bebas yang eksploitatif, sistem yang mengedepankan *keadilan distributif, infrastruktur logistik yang inklusif*, serta *regulasi berbasis maqashid al-shariah* menawarkan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga bermartabat. Dalam studi Kahf (2014), ditegaskan bahwa sistem ekonomi Islam seharusnya bertumpu pada keadilan, keberlanjutan, dan nilai spiritual yang membebaskan masyarakat dari hegemoni materialisme.

Negara-negara Muslim saat ini dapat mengambil pelajaran dari bagaimana Fatimiyah mengelola integrasi antara fiskal, perdagangan, dan kelembagaan keilmuan. Di era modern, pendekatan ini sejalan dengan gagasan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*) yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga distribusi yang adil dan perlindungan terhadap

kelompok marginal. Chapra (2000) bahkan menyebut bahwa kegagalan sistem konvensional terletak pada kehilangan nilai spiritual dalam perekonomian. Oleh karena itu, pendekatan Fatimiyah patut dijadikan model rekonstruksi ekonomi Islam global.

Strategi perdagangan Fatimiyah juga menekankan pentingnya diplomasi ekonomi yang santun namun strategis. Keterlibatan negara dalam menjalin hubungan dagang lintas peradaban dilakukan bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi semata, tetapi juga atas dasar misi dakwah dan pertukaran nilai. Dalam konteks globalisasi hari ini, diplomasi ekonomi negara-negara Islam perlu menekankan kembali nilai moral dalam interaksi pasar global, bukan sekadar bersaing dalam logika untung rugi (Asutay, 2012).

Fatimiyah juga mampu menciptakan harmoni antara pusat dan daerah, antara elite dan rakyat, antara Islam dan non-Muslim, tanpa kehilangan identitas politiknya. Praktik ini dapat menjadi inspirasi dalam merancang sistem perdagangan berbasis pluralisme yang tetap dalam bingkai hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, misalnya, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan perdagangan halal internasional yang inklusif namun berbasis syariah secara struktural dan substansial (Yusuf, 2022).

Salah satu elemen penting yang menonjol dalam kebijakan Fatimiyah adalah orientasi pembangunan jangka panjang. Alih-alih mengejar keuntungan sesaat, mereka membangun sistem ekonomi yang mampu bertahan lintas generasi. Infrastruktur yang mereka bangun, baik fisik seperti pelabuhan dan caravanserai, maupun intelektual seperti Dar al-'Ilm dan kebijakan fiskal, menunjukkan perencanaan negara yang visioner. Ini dapat dikontekstualisasikan dalam kebijakan pembangunan strategis jangka panjang negara-negara Muslim masa kini (Fakhry Zamzam, 2019).

Akhirnya, meskipun kekuasaan Fatimiyah tidak bertahan secara politik, warisan ekonomi dan sistem perdagangannya tetap relevan untuk ditelaah. Ketahanan sistem tersebut terhadap gangguan militer, tekanan eksternal, dan fluktuasi pasar merupakan bukti bahwa ekonomi berbasis nilai mampu menciptakan stabilitas dan daya tahan. Dalam kerangka sejarah Islam, Fatimiyah menunjukkan bahwa sistem perdagangan tidak hanya menjadi alat produksi dan distribusi barang, tetapi juga sebagai sarana membangun peradaban (Bennison, 2009; Rofiqoh, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Daulah Fatimiyah berhasil memosisikan perdagangan sebagai elemen strategis dalam membangun stabilitas politik, kekuatan ekonomi, dan pengaruh ideologis di kawasan dunia Islam dan sekitarnya. Perdagangan tidak sekadar menjadi aktivitas ekonomi, tetapi difungsikan sebagai

instrumen soft power yang memperkuat identitas Ismailiyah dan memperluas relasi diplomatik. Hal ini menjadikan kebijakan perdagangan Fatimiyah memiliki peran sentral dalam dinamika geopolitik Islam abad pertengahan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan Fatimiyah dalam mengelola infrastruktur niaga secara sistematis, baik melalui pengembangan pelabuhan utama seperti Alexandria dan Kairo, maupun dalam mengoptimalkan jalur karavan darat yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Infrastruktur tersebut diperkuat oleh institusi logistik seperti caravanserai dan marasi yang menopang kelancaran distribusi barang dan keamanan jalur perdagangan. Strategi ini mencerminkan visi dagang yang progresif dan adaptif terhadap tantangan eksternal.

Selain aspek infrastruktur, kebijakan fiskal Fatimiyah juga memainkan peran penting. Penerapan sistem pajak dan bea masuk yang adil dan fleksibel menunjukkan upaya negara dalam menciptakan distribusi kekayaan yang proporsional. Hasil pajak tersebut tidak hanya digunakan untuk pembiayaan negara, tetapi juga untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan ilmu pengetahuan. Konsep redistribusi dalam kebijakan fiskal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Prinsip inklusivitas dan keterbukaan menjadi ciri khas utama sistem perdagangan Fatimiyah. Dengan membuka ruang bagi pedagang dari berbagai latar belakang agama dan etnis, seperti Yahudi, Kristen Koptik, dan mitra dagang dari Eropa dan Asia, Fatimiyah menunjukkan kematangan dalam politik ekonomi berbasis toleransi. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Integrasi nilai-nilai Islam seperti al-'adl (keadilan), maslahah (kesejahteraan), dan syura (musyawarah) dalam kebijakan perdagangan menjadikan Fatimiyah sebagai model historis yang relevan untuk direkonstruksi dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Dalam era globalisasi yang sarat ketimpangan, praktik ekonomi Fatimiyah menawarkan paradigma alternatif yang menekankan pada etika, inklusi, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi perdagangan global Daulah Fatimiyah bukan hanya relevan secara historis, tetapi juga dapat dijadikan inspirasi dalam pembangunan sistem perdagangan Islam yang adil dan kompetitif di masa kini. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam aspek kelembagaan dan diplomasi perdagangan Fatimiyah secara kuantitatif dan perbandingan lintas dinasti untuk memperkuat kontribusi historis ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fauziah, St. Nurul Ilmi. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer."* Vol. 5.
- Al-Maqrizi. (2018). *Al-Khitat: Struktur Ekonomi dan Kota dalam Peradaban Islam.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anshary, Hafiz. 2016. "Pembangunan Ekonomi Di Masa Pemerintahan Dinasti Fatimiyah." *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi* 7(1):59-73.

- Asutay, M. (2012). Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus. *IIUM Journal of Economics and Management*, 20 (2), 191–221. <https://journals.iium.edu.my/jem/index.php/jem/article/view/354>
- Bennison, A. K. (2009). *The Great Caliphs: The Golden Age of the 'Abbasid Empire*. Yale University Press <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300152432/great-caliphs/>.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation <https://islamic-foundation.org.uk/publication/the-future-of-economics-an-islamic-perspective/>.
- Daftary, F. (2007). *The Ismailis: Their History and Doctrines* Cambridge University Press <https://www.cambridge.org/core/books/ismailis/AD3C31A21A15C4215E9110B6B9229D26>.
- Fakhry Zamzam, Havis. 2019. "Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah." *Jurnal Mizan* 3(1):99–116.
- Failure of Islamic Finance." *IIUM Journal of Economics and Management*, 20(2): 191–221.
- Fitriah, Siradjuddin. 2024. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Pada Daulah Fatimiyah: Studi Kebijakan Fiskal Dan Perdagangan." *Jurnal Al-Ubudiyah* 5(2):232–40.
- Farouq, M., & Salamah, R. A. 2022. "Pelabuhan dan Perdagangan Dunia Islam: Studi Banding Fatimiyah dan Umayyah Andalusia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2): 221–237.
- Halm, H. (1996). *The Fatimids and Their Traditions of Learning*. I.B. Tauris. <https://www.bloomsbury.com/uk/fatimids-and-their-traditions-of-learning-9781860640620/>
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Islamic Research and Training Institute <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0961819X1401300103>.
- Kholid, A. 2021. "Ekonomi Politik Daulah Fatimiyah dan Peran Intelektual Islam." *Jurnal Sejarah dan Ekonomi Islam*, 8(3): 98–112.
- Mannan, M. A. (1984). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Hodder and Stoughton <https://www.worldcat.org/title/islamic-economics-theory-and-practice/oclc/10574175>.
- Mutmainnah, Eka dkk. 2024. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Fatimiyah." *Pappasang* 6(1):228–49. doi: 10.46870/jiat.v6i1.924.
- Nur Annisa, Nasullah dkk. 2025. "Dinamika Ekonomi Dinasti Fatimiyah: Strategi Kebijakan, Peran Tokoh, Dan Faktor Kemajuan Serta Kemundurannya." *Jurnal Asy-Syarikah Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7(1):117–37.
- Rizqillah, N. M. 2023. "Jalur Dagang Maritim dalam Ekonomi Islam Klasik: Studi Strategis pada Era Fatimiyah." *Jurnal Ekonomi Syariah Global*, 4(1): 101–115.
- Rossa, Azzahra dkk. 2024. "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa

Author: Nurul Fitrah Ilham, Nasrullah Bin Sapa

- Kekuasaan Dinasti Fatimiah." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terhadap* 8(12):157-62.
- Rofiqoh, I. (2022). Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Fatimiyah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Sejarah Peradaban*, 7(2), 145-160. <https://doi.org/10.20414/jeisp.v7i2.2022>
- Sanders, P. 1994. "Fatimid Administration and Taxation in Egypt." *Islamic Studies Journal*, 3(1): 72-84.
- Yusuf, Sri Dewi. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8(1):65-79. doi: 10.54045/mutawazin.v3i1.633.